



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BOGOR**

Jl. Ahmad Adnawijaya No.45 A, RT.01/RW.16
Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor
Email : disdukcapilkotabogor@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 . Penyusunan Renja ini merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Bogor.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hal ini mengamatkan adanya proses perubahan dan penyempurnaan dalam sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, baik pada aspek mekanisme maupun dokumen perencanaan yang harus disusun oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sebagai penjabaran RPJMD dalam setiap Tahunnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai penjabaran (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode tahun yang merupakan salah satu landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang tercermin dalam program dan kegiatan yang akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024 masih belum optimal, oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bogor, Juli 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Bogor,

GANJAR GUNAWAN, A.P
NIP.19750715 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	25
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Kota Bogor	41
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL	48
KOTA BOGOR	
 BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

2.1.1	Realisasi Capaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024	10
2.1.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pemerintahan Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Tahun 2024	14
2.2.1	Keadaan Pegawai berdasarkan Status/Golongan	22
2.2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	24
2.3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
2.3.2	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	26
2.4.1	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	28
2.5.1	Usulan Program, Kegiatan dan Pemangku Kepentingan Kota Bogor.....	39
3.2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	42
4.1	Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	23
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk rencana strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun berdasarkan Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Bogor demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kota Bogor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran. Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja Perubahan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja Perubahan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5), RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 dan RPJPD Tahun 2005 - 2025.

Selanjutnya Renja Disdukcapil kota Bogor digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Bogor Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 didasarkan pada peraturan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi data Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bogor;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2019-2024;
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk jangka pendek 1 (satu) tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor secara berkesinambungan;
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah;
- c. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu;

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 adalah :

- a. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan;
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam Pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;

BAB II PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR TAHUN LALU

Bab ini menyajikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Review terhadap Rancangan akhir RKPD, Penelaahan usulan program, Kegiatan, Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Bab ini menyajikan tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 beserta kebutuhan pagu indikatif

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Evaluasi Rencana Kerja bertujuan untuk dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisari yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran /hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pelaksanaan program-program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2024 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah :

- 1) Adanya komitmen Pimpinan dan staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya kebijakan dari pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut;
2. Pelaksanaan Kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Sarana dan Prasarana perlu di *upgrade* untuk percepatan layanan;
4. Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/Jemput bola
5. Gangguan jaringan listrik;

6. Kendala system (Gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi SIAK)

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 4 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 102.420.000 dengan realisasai sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp. 98.309.000,- atau terserap 95,98 persen,

2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.287.157.100 dengan realisasai sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp. 2.284.625.500 - atau terserap 99,89 persen,

B. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

- 1) Dukungan Pimpinan
- 2) Komitmen yang tinggi dari aparat pelaksana;
- 3) Koordinasi yang baik dengan *stakeholder*;
- 4) Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Bogor;
- 5) Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberika kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket.

Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

1. Adanya kebijakan pusat tentang data terdistribusi menjadi data terpusat sehingga pelayanan adminduk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut;
2. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Sarana dan prasarana perlu di *upgrade* untuk percepatan layanan;
4. Gangguan jaringan listrik;
5. Kendala system (Gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis aplikasi SIAK)

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

- a. Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 107.979.900 dengan realisasai sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp. 106.152.000- atau terserap 98,31 persen,

2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 198.915.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.344.200 atau terserap 97,70 persen,

C. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

1. Kualitas SDM yang memadai dan komitmen pimpinan dan staf untuk diterapkannya pelayanan prima kepada masyarakat
2. Koordinasi dan Kerjasama di internal maupun dengan *stakeholder* telah berjalan

Faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

- 1) Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan *online* yang disediakan di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
- 2) Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon,
- 3) Memerlukan waktu yang tidak cepat dalam pengajuan PKS Pemanfaatan Data ke pusat (ijin PKS sangat tergantung pada Ditjen Dukcapil),
- 4) Keterlambatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yg diterbitkan dari pusat (Ditjen Dukcapil) sehingga terhambat dalam penyajian data (pengolahan data)

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Sub Kegiatan : Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 159.223.451,- atau terserap 97,70 persen

2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan :

1) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2) Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 227.485.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.139.198,- atau terserap 99,85 persen,

D. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu

1. Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 36.673.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.281.700,- atau terserap 98,93 persen,

Alokasi dana anggaran untuk kegiatan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sesuai dengan DPA yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 semester 1 (Januari s.d Juli 2024) sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini :

2.1.1. Realisasi Capaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	Realisasi	
					Rp	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		143.181.600	142.463.814	99.50
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.181.600	142.463.814	99.50
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.435.177.179	9.054.988.171	95.97
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.435.177.179	9.054.988.171	95.97
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		817.252.900	808.390.571	99,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.762.500	15.762.500	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.760.400	53.760.400	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.882.000	209.860.000	99,99
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan	65.965.000	64.755.000	98,17
			Fasilitas Kunjungan Tamu	121.076.000	120.911.000	99.86
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.807.000	341.341.671	97,30

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		251.316.400	243.501.300	96,89
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	251.316.400	243.501.300	96,89
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.682.128.292 254.999.892	1.660.528.262 238.100.811	99,00 93,37
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.128.300	1.422.427.451	99,67
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		413.296.100	387.277.253	93,70
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.155.800	79.825.700	82,16
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.138.300	221.139.553	96,51
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	87.002.000	86.312.000	99,21

II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		102.420.000	98.309.000	95,98
			Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.770.000	8.441.000	86,40
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	9.770.000	8.441.000	86,40
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	82.880.000	81.427.000	98,25
				2.287.157.100	2.284.625.500	99,89
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2.287.157.100	2.284.625.500	99,89
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil		107.979.900	106.152.000	98,30
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.989.900	8.177.500	90,96
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	98.990.000	97.974.500	98,97
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		198.915.000	194.344.210	97,70
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	198.915.000	194.344.210	97,70

IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		160.000.000	159.223.451	99,51
			Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	160.000.000	159.223.451	99,51
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		227,485.900	227.139.198	99,85
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	227,485.900	227.139.198	99,85
			Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	-	-	-
V	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan		36.673.000	36.281.700	98,93
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	36.673.000	36.281.700	98,93
	TOTAL ANGGARAN			15.862.983.371	15.401.224.430	97,09

Tabel 2.1.2
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Disdukcapi Tahun 2025	Realisasai Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian	
				Target Renja Disdukca pil Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Disdukca pil Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%) 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra, Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Dokumen Manajemen Resiko, Peta Proses Bisnis Disdukcapi	5 Dokumen	12 Bulan	N/A	12 Bulan	100	N/A	7 Bulan	55

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan LKIP, LKPJ, Laporan Evaluasi Renja, Laporan SKM,Laporan Audit ISO 9001:2015	5 Laporan	12 Bulan	5 Laporan	12 Bulan	100	5 Laporan	7 Bulan	55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN,Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	14 Bulan	50 Orang/Bulan	14 Bulan	100	50 Orang/Bulan	7 Bulan	55
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Laporan Keuangan Triwulan,Laporan Keuangan Semesteran,Laporan Keuangan Tahunan	18 Laporan	12 Bulan	18 Laporan	12 Bulan	100	18 Laporan	7 Bulan	55
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan Instalansi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	100	1 Paket	7 Bulan	55
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan Rumah Tangga Kantor yang disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	100	1 Paket	7 Bulan	55
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	100	1 Paket	7 Bulan	55
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Amplop Dinas Blanko Dinas Buku Disposisi Dus Arsip Besar Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Jilid Penggandaan/Fotocopy	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	100	1 Paket	7 Bulan	55

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Makanan dan Minuman Tamu Penggandaan/Fotocopy	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	7 Bulan	55
Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	7 Bulan	55
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Kadis, Sekdis	1 Unit	N/A	N/A	12 Bulan	100	12 Laporan	7 Bulan	55
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop Mesin Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) Pengadaan Komputer Pengadaan AC Split Perangkat Perekaman dan Pencetakan KTP-el Printer AC Fortable Printer Fargo (E-KTP) Printer Evolis	40 Unit	12 Bulan	69 Unit	12 Bulan	100	1 Paket	7 Bulan	55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Air Belanja Kawat/Faxsimili/Internet/Pos Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Telepon Penggandaan/Fotocopy	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	7 Bulan	55

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Belanja Jasa Tenaga Keamanan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Belanja Jasa Tenaga Supir Belanja Pakaian Dinas Belanja Pakaian Kerja Satpam Belanja Premi BPJS Kesehatan Belanja Sepatu Harian (PDH)	12 Laporan	13 Bulan	12 Laporan	13 Bulan	100	13 Laporan	7 Bulan	55
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Penggandaan/Fotocopy	17 Unit	12 Bulan	22 Unit	12 Bulan	100	17 Unit	7 Bulan	55
Pemeliharaan Rehabilitasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan 1000 meter	1 Unit	12 Bulan	1 Unit	12 Bulan	100	1 Unit	7 Bulan	55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya Pemeliharaan Printer, Komputer, Genzet, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Sound Sistem, Pemeliharaan Pencacah Kertas, Honorarium	253 Unit	12 Bulan	253 Unit	12 Bulan	100	253 Unit	7 Bulan	55

	Pejabat Pengadaan/Jasa Pemeliharaan Genzet, Pemeliharaan Sarana Kantor, Server								
Pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Belanja makan minum dan lembur non ASN untuk pelayanan keliling dan jemput bola non permanen dan kaum rentan	2 Dokumen	12 Bulan	N/A	12 Bulan	100	2 Dokumen	7 Bulan	55
Pencatatan, Penatausahaann dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Belanja makan minum dan lembur non ASN untuk pelayanan keliling dan jemput bola KIA, KK, KTP	2 Dokumen	12 Bulan	2 Dokumen	12 Bulan	100	2 Dokumen	7 Bulan	55
Peningkatan Pelayanan Penduduk	Belanja makan minum dan lembur non ASN untuk pelayanan keliling dan jemput bola DFF, SOS	2 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	100	2 Laporan	7 Bulan	55
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Laporan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15 Laporan	12 Bulan	10 Laporan	12 Bulan	100	15 Laporan	7 Bulan	55
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Tersedianya alat-alat penunjang penerbitan dokumen pendftaran penduduk	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	100	1 Laporan	7 Bulan	55

Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi terkait pendaftaran penduduk	100 Orang	12 Bulan	N/A	N/A	100	150 orang	7 Bulan	55
Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Tersedianya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	N/A	N/A	12 Laporan	12 Bulan	100	12 Laporan	7 Bulan	55
Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Terlaksananya Bimtek Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	12 Bulan	2 laporan	12 Bulan	100	2 Laporan	7 Bulan	55
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Tersediannya Buku Register yang telah di cetak	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	100	12 Dokumen	7 Bulan	55
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyediaan Makan dan Minum Tim Pelayanan Keliling Jemput Bola (Non ASN)	504 Layanan	12 Bulan	1 Layanan	12 Bulan	100	504 Layanan	7 Bulan	55
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Tersediannya Cetak Formulir Pencatatan DSipil	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	100	1 Laporan	7 Bulan	55
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	100	1 Laporan	7 Bulan	55
Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Pelaksanaan Bimtek Pencatatan Sipil	N/A	12 Bulan	30 Orang	12 Bulan	100	N/A	7 Bulan	55
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pelaksanaan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan melalui aplikasi	Data	N/A	10 Data	12 Bulan	100	15 Data	7 Bulan	55

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pelaksanaan Kerjasama sosialisasi pelayanan melalui publikasi media	Dokumen	N/A	Dokumen	N/A	N/A	Dokumen	N/A	N/A
Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Pakuan Prima dan Sitanduk Wilayah	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	12 Bulan	100	1 Laporan	7 Bulan	55
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan sosialisasi pelayanan adminduk melalui media cetak	5 Institusi	12 Bulan	10 Institusi	12 Bulan	100	15 Institusi	7 Bulan	55
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Pelaksanaan sosialisasi pelayanan adminduk melalui media cetak	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	100	12 Dokumen	7 Bulan	55
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimtek Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2 Laporan	12 Bulan	2 Laporan	12 Bulan	100	2 Laporan	7 Bulan	55

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 173).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang memiliki KK
2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP-el
3. Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk mencapai target prosentase kepemilikan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan, dan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan.

Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan aplikasi pelayanan, Pemeliharaan Jaringan online dan hardware, Pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Penataan dokumen kependudukan, Pembangunan aplikasi pelayanan, Peningkatan SDM operator, Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan, dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan.

Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan surat pindah datang, Pelayanan Kartu Keluarga, Pengelolaan informasi kependudukan, Intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dan Pemeliharaan jaringan online dan hardware.

Untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan online dan perangkat keras/hardware, Pengadaan peralatan pendukung SIAK, Peningkatan SDM operator SIAK, dan Pengelolaan Informasi kependudukan guna meningkatkan kesadaran tertib administrasi dilakukan langkah-langkah kerjasama antar SKPD dan membuat dan meningkatkan inovasi, sosialisasi yang dilakukan melalui pembuatan company profil disdukcapil agar masyarakat lebih memahami kinerja disdukcapil dan pembuatan animasi pelayanan merupakan inovasi sosialisasi dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

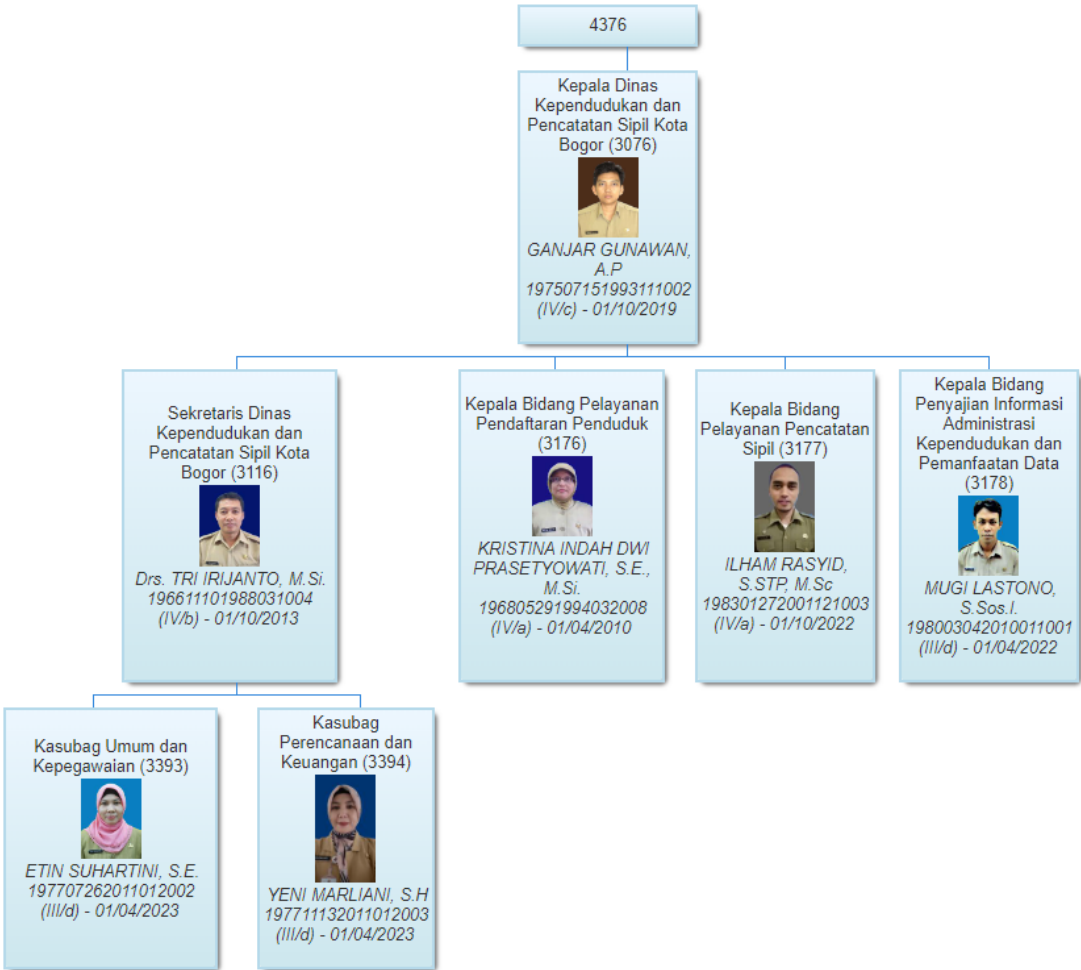
Dalam mewujudkan layanan-layanan tersebut, Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh sarana/prasarana yang cukup memadai seperti mesin anjungan nomor antrian, pojok baca, tempat duduk lansia, parkir kendaraan kaum difabel, kursi roda bagi kaum difabel, dan sarana-sarana penunjang lainnya yaitu pojok ASI, penyediaan air siap minum (dari PDAM), parkir kendaraan, arena bermain anak dan musholla.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan di dukung 50 pegawai dengan struktur organisasi sebagai berikut

Tabel. 2.2.1
Keadaan Pegawai berdasarkan status/Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS- Golongan IV	4 Orang
2	PNS- Golongan III	41 Orang
3	PNS- Golongan II	5 Orang

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Diinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penduduk yang ber-KTP/Jumlah Penduduk Wajib KTP	98%		72.05%	93.30%	98%	97%	99.03%	98%	100%	100%	Adanya Peningkatan Kesadaran Penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (KTP)
2	Persentase Penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk	94%		86%	75%	95%	96%	94.07%	94.07%	100%	100%	Adanya Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (Akte)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya. Dinamika perubahan lingkungan Strategis sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Adapun permasalahan -permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayananpada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana dalam table 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

N o	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal pada periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2	Rasio Bayi berakte Kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Rasio Pasangan berakte Nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan Skala Kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	75	80	85	90	95	100	100

7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	75	76	80	82	85	90	90
8	Kepemilikan KTP	%	93,30	99,50	99,80	100	100	100	100
9	Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 PDDK	Buah	25	25	24,5	24	23,2	23	23
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	94,07	95	96	97	98	100	100
11	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	%	3,80	25	30	35	40	45	45

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pencana Pembangunan, dibuat table pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Identifikasi masalah pokok, masalah dan akar masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Penduduk migran yang belum terdata	Kurangnya pengawasan dan pendataan Kependudukan pasca libur Lebaran
		Banyaknya Penduduk hanya pindah secara fisik tapi administrasi kepindahannya tidak diurus
	Pengendalian penduduk belum optimal	Penduduk tidak langsung melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian
		Kurangnya pengawasan terhadap WNA yang ada di Kota Bogor

2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 memuat perubahan, arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, urusan pemerintahan disertai dengan perubahan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selaras dengan penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran. Sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan				
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA									
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	11.900.000	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	N/A	N/A
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	144.399.100	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	250.000.000
		Kota Bogor	Tersedianya Buku Survey Kepuasan Masyarakat	18 Buku			Kota Bogor			
		Kota Bogor	Tersedianya Seritfikat Hasil ISO	1 Sertifikat			Kota Bogor			
		Kota Bogor	Tersusunnya Laporan Renstra, Renja, Laporan LKIP, LKPJ,	30 Buku			Kota Bogor			

			LPPD dan Laporan Keuangan							
		Kota Bogor	Tersusunnya RKA dan DPA	10 Buku			Kota Bogor			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.008.687.679	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	12.000.000.000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Bogor	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	68 orang	30.675.174	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Bogor	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	68 orang	30.675.174
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			%			Kota Bogor			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya pemeliharaan dan peralatan listrik	1 Paket	17.921.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya pemeliharaan dan peralatan listrik	1 Paket	35.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya pembelian alat2 Kebutuhan Kantor	1 Paket	128.155.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya pembelian alat2 Kebutuhan Kantor	N/A	N/A
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya Isi Galon, Masker, pengisian Tabung Gas, Peralatan dan Bahan Pakai Habis	1 Paket	64.881.700	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya Isi Galon, Masker, pengisian Tabung Gas, Peralatan dan Bahan Pakai Habis	1 Paket	100.000.000

			Rumah tangga dan Peralatan Taman					Rumah tangga dan Peralatan Taman		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	364.333.900	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	900.000.000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya Amplop Dinas, Blanko Dinas, Buku Disposisi dan Dus Arsip	1 Paket	26.425.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya Amplop Dinas, Blanko Dinas, Buku Disposisi dan Dus Arsip	1 Paket	350.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Laporan	131.341.400	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Laporan	250.000.000
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Laporan	414.847.000	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Laporan	700.000.000
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	N/A	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	800.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Harddisk Eksternal, Harddisk Server HP, Harddisk Server untuk Server Sikancil, Komputer PC, Microsoft Windows Server 2019, Pintu Pingger Print, Printer E-KTP, Printer Evolis Avansia, Printer	120 Unit	993.803.300	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bogor	Harddisk Eksternal, Harddisk Server HP, Harddisk Server untuk Server Sikancil, Komputer PC, Microsoft Windows Server 2019, Pintu Pingger Print, Printer E-KTP, Printer Evolis Avansia, Printer Evolis Primacy, Server	120 Unit	1.300.000.000

			Evolis Primacy, Server Data Base, Switch Hub Dlinkl 24 Port					Data Base, Switch Hub Dlinkl 24 Port		
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	N/A	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	300.000.000
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Belanja Air, Belanja Kawat/Faximili/Int ernet dan Pos, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, dan Belanja Telepon	12 Laporan	264.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Belanja Air, Belanja Kawat/Faximili/Int ernet dan Pos, Belanja Listrik, Belanja Surat Kabar/Majalah, dan Belanja Telepon	12 Laporan	600.000.0000
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Belanja Pakaian Dinas, Belanja Jasa Keamanan, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Pakaian Kerja Satpam, Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Belanja Sepatu Harian (PDH)	12 Laporan	1.472.326.948	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Belanja Pakaian Dinas, Belanja Jasa Keamanan, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Pakaian Kerja Satpam, Belanja Premi BPJS Kesehatan dan Belanja Sepatu Harian (PDH)	12 Laporan	1.600.000.000

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Pajak Kendaraan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkut -Alat Angkut Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	23 Unit	165.057.700	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Pajak Kendaraan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkut -Alat Angkut Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang	30 Unit	350.000.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor, Pembangunan Gedung Kantor dan DED Pembangunan Kantor	1 Unit	471,408,000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor, Pembangunan Gedung Kantor dan DED Pembangunan Kantor	1 Unit	400.000.000
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana AC Split, Pemeliharaan Sarana Kantor Mesin pencacah kertas, Pemeliharaan Sarana Kantor Personal	10 Unit	132.200.200	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Pemeliharaan Sarana AC Split, Pemeliharaan Sarana Kantor Mesin pencacah kertas, Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook , Pemeliharaan Sarana Kantor Printer e-KTP	18 Unit	400.000.000

			Computer/Notebook , Pemeliharaan Sarana Kantor Printer e-KTP							
	PROGRAM : PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kota Bogor								
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya Arsip Digital	1 Paket	N/A	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya Arsip Digital	3 Dokumen	600.000.000
	Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	N/A	Sub Kegiatan : Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	23 Dokumen	300.000.000
	Sub Kegiatan : Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	118.860.300	Sub Kegiatan : Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	250.000.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya Brosur, Media Cetak Lokal, Poster, X Banner	1 Laporan	160.271.400	Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya Brosur, Media Cetak Lokal, Poster, X Banner	N/A	N/A

	Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen	126.690.000	Sub Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	N/A	N/A
	Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	N/A	Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	600.000.000
	PROGRAM : PENDAFTARAN PENDUDUK									
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Pemutakhiran Data Penduduk	1 Dokumen	52.258.500	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Pemutakhiran Data Penduduk	1 Dokumen	300.000.000
	Sub Kegiatan : Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	2 Dokumen	N/A	Sub Kegiatan : Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	2 Dokumen	150.000.000

	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya kualitas Pelayanan Melalui Konsultasi dan Evaluasi, Terlaksananya Pelayanan Keliling	2 Dokumen	61.587.400	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya kualitas Pelayanan Melalui Konsultasi dan Evaluasi, Terlaksananya Pelayanan Keliling	2 Dokumen	500.000.000
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Pelayanan Penduduk Pindah datang WNI dan WNA, Tersedianya RW Percontohan	1 Laporan	80.338.000	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Pelayanan Penduduk Pindah datang WNI dan WNA, Tersedianya RW Percontohan	1 Laporan	200.000.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	N/A	Sub Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	300.000.000
	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	N/A	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1.000.000.000

	Sub Kegiatan : Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Cleaning Card Evolis Avansia, Cleaning Kit (Khusus Printer KTP-el), Full Color Ribbon With Resin Black and Heat Seal Panel, HDP Film, Ribbon Color Evolis Avansia YMCKH, Ribbon FilmEVALIS Avam=nsia YMCKH	1 Laporan	3.257.318.200	Sub Kegiatan : Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Cleaning Card Evolis Avansia, Cleaning Kit (Khusus Printer KTP-el), Full Color Ribbon With Resin Black and Heat Seal Panel, HDP Film, Ribbon Color Evolis Avansia YMCKH, Ribbon FilmEVALIS Avam=nsia YMCKH	1 Laporan	3.500.000.000
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	N/A	Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	500.000.000
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	N/A	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	250.000.000

	PROGRAM : PENCATATAN SIPIL	Kota Bogor								
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	37.652.600	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen	300.000.000
	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pelayanan Pencatatan Sipil, tersedianya penjilidan Buku Register Akta	1 Layanan	36.499.400	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pelayanan Pencatatan Sipil, tersedianya penjilidan Buku Register Akta	1 Layanan	200.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	N/A	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	2.350.000.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Bogor								
	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	1 Laporan	N/A	Sub Kegiatan : Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Kota Bogor	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	1 Laporan	250.000.000

	Penting Terkait Pencatatan Sipil		Penting Terkait Pencatatan Sipil			Penting Terkait Pencatatan Sipil		Penting Terkait Pencatatan Sipil		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Tersedianya Blanko KIA, Tersedianya cetak Formulir Pencatatan Sipil, Tersedianya Cetak Map Akta Kelahiran, Tersedianya cetak map akta kematian, Tersedianya cetak map akta kutipan kedua, tersedianya cetak map akta perceraian, tersedianya map akta perkawinan	1 Laporan	294.567.500	Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		Tersedianya Blanko KIA, Tersedianya cetak Formulir Pencatatan Sipil, Tersedianya Cetak Map Akta Kelahiran, Tersedianya cetak map akta kematian, Tersedianya cetak map akta kutipan kedua, tersedianya cetak map akta perceraian, tersedianya map akta perkawinan	1 Laporan	1.000.000.000
	PROGRAM : PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									
	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan									
	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Tersusunnya Buku Profil kependudukan	2 Dokumen	26.544.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Tersusunnya Buku Profil kependudukan	2 Dokumen	200.000.000

Sumber : Renstra Disdukcapil Perubahan Tahun 2019-2024

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Bogor. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BBogor Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor nTahun 2019-2024 dan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Bogor

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
N I H I L					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BPGPR

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indicator kinerja dan rencana Tingkat capaian (target) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik Tingkat nasional maupun provinsi.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan kondisi jumlah penduduk Indonesia yang besar, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, Tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana program nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk dapat dikelola dengan perencanaan yang baik.

Perioritas pembangunan dalam menangani urusan kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2020-2024, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berada pada perioritas Nomor 3 yaitu : “Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing” dengan prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada tiga strategi yaitu : (1) Penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial, (2) Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta (3) Penguatan karakter dan kebudayaan.

Dari perioritas tersebut sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan antara lain melalui :

1. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
2. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk
3. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan;
4. Peningkatan kapasitas SDM;
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.

Sesuai arahan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian dalam Negeri maka focus pelayanan Administrasi Kependudukan adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat, yang dilaksanakan dengan perbaikan kualitas pelayanan melalui pelayanan secara daring/ online, pelayanan yang cepat dan mudah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026 Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mengacu kepada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026, yaitu sebagaimana dalam table 3.2.1 berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja		
					Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata Kelola pelayanan public yang berkualitas			Predikat SAKIP di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	A	A	A	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	3.78	3.80	3.82	3.82
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor			Nilai SAKIP di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	89.43	91.5	93.5	93.5

			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	97.42	98.30	98.40	98.40
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat	100	100	100	100
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >70)	7	1	1	9
		Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja	28.86	29	29.5	29.5
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja	28.50	28.5	29	29
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja	11.02	11.5	12	12
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal	21.05	22	22.5	22.5

			perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	100	100
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	100	100
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di Lingkup Disdukcapil		94	94	94
			Persentase Kepatuhan anggaran	100	100	100	100
			Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	97.09	97.50	98	98
			Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100	100	100	100

	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor	94.51	95	95.5	95.5
		Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	91.61	92.50	93	93
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	92.25	93	93.5	93.5
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	91.91	96	96.5	96.5
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	98.5	98.5	99	99

Terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan Legalitas kependudukan			Prosentase pemenuhan identitas kependudukan		99.20	99.30	99.30
	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan		Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E KTP	100	100	100	100
			Persentase Anak yang memiliki KIA	70.10	82.00	84.00	84.00
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 tahun	98.00	99.20	99.50	99.50
			Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil	63.89	69.44	72.22	72.22
		Program : PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	100	100	100	100
			Persentase cakupan perekaman E KTP	100	100	100	100

		Program : PENCATATAN SIPIL	Persentase Pendataan akta kelahiran 0-18 Tahun	98.00	99.20	99.50	99.50
			. Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	55	65	70	70
		Program : PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data kependudukan yang diperlukan OPD sesuai dengan SOP Kerjasama Pemanfaatan Data	52	60.87	69.57	69.57

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 serta Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kota Bogor, dimana tema RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah **“MEMPERKOKOH KEMANDIRIAN MASYARAKAT”**. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menjadi perangkat daerah yang mendukung tujuan RPD Kota Bogor, yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan” dan “ Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.
3. Keserasian dan Keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Bogor;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan/ Sub Kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Program Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki 3 (tiga) Rumusan Program, 13 (tiga belas) rumusan kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) rumusan sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 15.720.053.833 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, yaitu :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Tahun 2025

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH
(1)					(2)	(3)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
2	12	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2	12	01	2.01	07	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	114.761.700
2	12	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2	12	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.313.609.137
2	12	01	2.02	02	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	49.984.000
2	12	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	12	01	2.06	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponenn Instalansi Listrik/Penerangan Bangun Kantor	17.499.500
2	12	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.491.400
2	12	01	2.06	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.917.700
2	12	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.612.000
2	12	01	2.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	74.850.000
2	12	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.631.400
2	12	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	12	01	2.07	06	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	354.831.600
2	12	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	12	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.132.920
2	12	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.566.928
2	12	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	12	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	204.793.737
2	12	01	2.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	234.296.000
2	12	01	2.09	10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	135.933.969
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
2	12	02	2.01		Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2	12	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	19.539.900

2	12	02	2.02		Kegiatan :Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
2	12	02	2.02	02	Sub Kegiatan : Fasilitas Pendaftaran Penduduk	1.501.488.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
2	12	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	75.369.200
2	12	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	24.883.200
2	12	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
2	12	03	2.02	06	Sub Kegiatan : Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	100.015.500
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2	12	04	2.01		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
2	12	04	2.01	01	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	63.746.200
2	12	04	2.01	03	Sub Kegiatan : Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	142.640.000
2	12	04	2.03		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk	
2	12	04	2.03	07	Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan Masyarakat.	79.459.842
					TOTAL JUMLAH SELURUH PAGU	15.720.053.833

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bogor;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat pengurangan output/keluaran Program kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ini juga berpedoman pada RKPD Kota Bogor Tahun 2024 dan tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bogor dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari

peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Bogor. Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Anggaran 2025.

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

